

ANALISIS PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI (STUDI KURIKULUM PROGRAM STUDI MUAMALAH JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM STAIN SAMARINDA)

Darmawati
Parno
STAIN Samarinda

Abstract

The aim of this research are to know objective condition of curriculum at Muamalah Courses now (that still be used now) and to know development of curriculum based on stakeholders needs. Analysis model that be done is interactive analysis, with four components: data reduction, data display, conclusion and verification doing by simultaneously. The result is both in term of design, implementation and evaluation still need reviewed and assessed comprehensive and completely based on stakeholders needs.

Keywords: curriculum, design, implementation and evaluation

A. Latar Belakang

Peran perguruan tinggi di Indonesia cukup penting dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat dan menjadi pemasok sumber daya manusia yang dibutuhkan bagi berjalannya roda kehidupan ekonomi, politik, dan kebudayaan.¹ Bahkan konsep pembangunan masyarakat juga lahir dari kalangan terdidik yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Lebih jauh lagi, kepemimpinan intelektual dan politik di negeri ini juga lahir dari perguruan tinggi. Bagi Indonesia yang telah memasuki fase demokratisasi yang ditandai dengan adanya kebijakan desentralisasi, peran perguruan tinggi sudah mulai harus diarahkan untuk menjawab permasalahan lokal.² Disamping itu tantangan dan hambatan perguruan tinggi di Indonesia hari ini semakin kompleks, beban yang dipikul oleh perguruan tinggi untuk mencerdaskan bangsa semakin lama dirasakan sebagai pekerjaan yang maha berat. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, bahkan ada anggapan yang berkembang ditengah masyarakat bahwa perguruan tinggi hanya bisa menelorkan ide-ide cerdas dan bermutu dalam berbagai forum dan kegiatan ilmiah sementara sangat sulit untuk dilakukan, anggapan ini merupakan anggapan yang harus diluruskan, keberadaan perguruan tinggi adalah sebuah aset bangsa yang sangat besar dan memiliki peranan yang strategis dalam upaya meningkatkan kualitas, dan daya saing bangsa sehingga sangat diperlukan upaya-upaya untuk semakin

¹Hasan, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Berdasarkan SK Mendiknas 232/U/2000 dan Alternatif Pemecahannya*, (Bandung: UPI, 2002), hal.22

²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 1999. Tentang: *Pendidikan Tinggi*. Jakarta, (Jakarta, Dikti-Kemdikbud, 1999)

memantapkan dan memaksimalkan fungsi dan peran yang diembannya hari ini dan masa depan.³

Perguruan tinggi memainkan peranan penting dalam upaya pengembangan *technopreneurship*. Perguruan tinggi harus dipahami sebagai kawah candradimuka dimana para *technopreneur* handal masa depan Indonesia dibentuk dan dilahirkan.⁴ Perguruan tinggi dalam prosesnya, yang termanifestasi dalam bentuk tri dharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus menanamkan nilai-nilai *technopreneurship*. Perguruan tinggi harus memiliki kredibilitas institusional secara utuh dan menyeluruh. Sistem ini harus memiliki akuntabilitas yang tinggi terhadap masyarakat, menunjukkan efisiensi dalam operasionalnya, menghasilkan lulusan yang berkualitas, memiliki manajemen internal yang transparan dan memenuhi standar.

Persoalan akses dan pemerataan juga menjadi dilema tersendiri dalam pendidikan tinggi di Indonesia, banyak pemuda/i usia 19-24 tahun yang *notabene* merupakan usia produktif dalam pendidikan tinggi tidak dapat menikmati dan mengikuti pendidikan di perguruan tinggi dengan alasan yang beragam seperti tidak ada biaya, tidak ada motivasi untuk melanjutkan, tidak memiliki bakat dan minat untuk meneruskan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan merasa sudah cukup dengan bekal ilmu yang dimiliki dan berbagai alasan yang lain. Berikut data keadaan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia sejak tahun 2005 hingga tahun 2011.

Tabel 1.1 APK Pendidikan Tinggi di Indonesia 2005 s.d 2011

| Deskripsi | Tahun | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Populasi (Usia 19 – 23) | 21.190.000 | 21.184.100 | 21.174.900 | 21.171.200 | 21.170.300 | 19.844.485 | 19.858.146 |
| Jumlah Mahasiswa | 3.868.358 | 4.285.645 | 4.375.505 | 4.501.543 | 4.657.547 | 5.226.450 | 5.381.216 |
| PTN | 805.479 | 824.693 | 978.739 | 965.970 | 1.011.721 | 1.030.403 | 1.063.274 |
| PTS | 2.243.760 | 2.567.879 | 2.392.417 | 2.410.276 | 2.451.451 | 2.886.641 | 2.928.890 |
| PT Kedinasan | 48.493 | 51.318 | 47.253 | 47.253 | 66.535 | 92.971 | 101.351 |
| Religious HEI | 508.545 | 518.901 | 506.247 | 556.763 | 503.439 | 571.336 | 620.938 |
| Universitas Terbuka (UT) | 262.081 | 322.854 | 450.849 | 521.281 | 624.401 | 645.099 | 666.763 |
| APK (%) | 18,26% | 20,23% | 20,66% | 21,26% | 22,00% | 26,34% | 27,10% |

Sumber : Dikti (2011)

Dari tabel di atas terlihat bahwa APK Pendidikan Tinggi di Indonesia masih rendah yang hanya berada pada kisaran di bawah 30%

³Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang : Sistem Pendidikan Nasional . Jakarta.

⁴ Suparno, Erman. *Peran Universitas sebagai Institusi Inelektual Kapital dalam Penanggulangan Pengangguran dan Kemiskinan*. Kuliah Umum di Universitas Jenderal Soedirman 27 Maret 2009. Purwokerto

dari total penduduk berusia 19-24 tahun yang seharusnya menikmati pendidikan di perguruan tinggi.

Di samping persoalan akses dan pemerataan, mutu perguruan tinggi merupakan sebuah jaminan (garansi) yang diberikan kepada calon mahasiswa, sehingga calon mahasiswa akan mendapatkan sebuah kepastian prospek masa depan mereka melalui perguruan tinggi yang telah dipilih. Sangat banyak indikator yang dijadikan sebagai tolok ukur mutu sebuah perguruan tinggi agama Islam seperti kualifikasi pendidikan dosen, sarana dan prasarana belajar, jumlah karya ilmiah yang dihasilkan dosen, lulusan, peringkat dalam ranking perguruan tinggi agama Islam yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, pelayanan yang diberikan, dan lain sebagainya. Seluruh indikator mutu ini dijadikan sebagai dasar oleh beberapa lembaga resmi dalam menentukan peringkat perguruan tinggi itu dalam berbagai kawasan, berikut ditampilkan data peringkat beberapa perguruan tinggi agama Islam di Indonesia berdasarkan *webometrics ranking*:

Tabel.1.2
Peringkat Beberapa Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia
Menurut *Webometrics Ranking*

| Nama Perguruan Tinggi | Word Ranking 2013 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Universitas Islam Indonesia | 1.463 |
| Universitas Muhammadiyah Malang | 1.492 |
| Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 1.543 |
| Universitas Muhammadiyah Surakarta | 1.652 |
| UIN Malang | 1.733 |
| IAIN Sunan Ampel | 3.664 |
| UIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru | 3.716 |
| UIN Syarif Hidayatullah | 4.182 |
| UIN Sunan Kalijaga | 7.109 |
| STAIN Purwokerto | 14.734 |
| STAIN Pare-Pare | 18.698 |

Sumber: Diktis Kemenag (2013)

<http://www.webometrics.info/en/Asia/Indonesia>

Dari data di atas apabila dilihat secara mutu ternyata perguruan tinggi agama Islam di Indonesia berada pada peringkat di atas kelompok 500, artinya tidak terlalu mengembirakan apabila dibandingkan dengan perguruan tinggi lain yang berada pada kelompok utama seperti top 10 atau 100 namun dalam pandangan persaingan globalisasi peringkat di atas 500 ini tetap mencerminkan pencapaian yang tidak menguntungkan dari sisi daya saing.

1. Persoalan Relevansi

Persoalan relevansi dapat dimaknai sebagai kesesuaian apa yang dihasilkan perguruan tinggi dengan respon dunia kerja, artinya dengan melihat seberapa besar daya serap dunia kerja terhadap lulusan perguruan tinggi dapat dikatakan bahwa adanya kesesuaian antara keduanya, apabila daya serap dunia kerja terhadap lulusan perguruan tinggi sangat kecil sehingga menjadi penyumbang angka pengangguran yang semakin tinggi berarti terjadi persoalan relevansi antara pendidikan dengan dunia kerja, artinya kriteria dan kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja tidak terpenuhi oleh para lulusan perguruan tinggi. Pengangguran yang terjadi bahkan memperlihatkan angka yang mengkhawatirkan terutama mereka yang menganggur dalam strata pendidikan S1 atau D3 apabila dilihat dari persoalan relevansi berarti dunia kerja tidak memberikan kesempatan kepada lulusan ini karena berbagai alasan mendasar diantaranya kualifikasi dan kompetensi yang tidak memenuhi persyaratan yang diinginkan, berikut ditampilkan data jumlah pengangguran di Indonesia menurut pendidikannya :

Tabel 1.3 Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2011 - 2013

| No. | Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|-----|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Februari | Agustus | Februari | Agustus | Februari |
| 1 | Tidak/belum pernah sekolah | 92,142 | 190,370 | 123,213 | 82,411 | 109,865 |
| 2 | Belum/tidak tamat SD | 552,939 | 686,895 | 590,719 | 503,379 | 513,534 |
| 3 | SD | 1,275,890 | 1,120,090 | 1,415,111 | 1,449,508 | 1,421,653 |
| 4 | SLTP | 1,803,009 | 1,890,755 | 1,716,450 | 1,701,294 | 1,822,395 |
| 5 | SLTA Umum | 2,264,376 | 2,042,629 | 1,983,591 | 1,832,109 | 1,841,545 |
| 6 | SLTA Kejuruan | 1,082,101 | 1,032,317 | 990,325 | 1,041,265 | 847,052 |
| 7 | Diploma I,II,III/Akademi | 434,457 | 244,687 | 252,877 | 196,780 | 192,762 |
| 8 | Universitas | 612,717 | 492,343 | 541,955 | 438,210 | 421,717 |
| | Total | 8,117,631 | 7,700,086 | 7,614,241 | 7,244,956 | 7,170,523 |

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

Data yang diungkapkan oleh BPS tahun 2013 yang menyebutkan angka 2,69% pengangguran terbuka dari lulusan D1, D2, dan lulusan D3/akademisi serta 5,88% lulusan universitas, artinya persentase pengangguran terbuka menurut pendidikannya disumbangkan oleh pendidikan tinggi sebesar 8,57% dari total pengangguran terbuka.

Penelitian ini dilaksanakan, untuk mengetahui kondisi objektif kurikulum Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Samarinda yang ada saat ini.

B. Pembahasan

1. Dasar Pengembangan Kurikulum

a. Dasar Hukum

Berdasarkan dokumen yang telah dicantumkan pada bagian awal pembahasan kurikulum Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Samarinda khususnya pada bagian dasar pengembangan kurikulum, hal penting yang menjadi catatan adalah pengembangan kurikulum yang dilakukan hanya memperhatikan dasar hukum dan peraturan perundangan yang ada, sehingga kurikulum yang dikembangkan di Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Samarinda boleh dikatakan sebagai kurikulum yang sangat taat azas hukum dan memiliki kesuaian yang tinggi dengan peraturan perundangan yang telah dikeluarkan. Landasan pengembangan kurikulum adalah pijakan awal bagi pengembang dan perancang kurikulum dan akan sangat menentukan corak dan bentuk kurikulum yang akan dilahirkan nantinya.⁵ Diibaratkan dengan pekerjaan seorang arsitektur bangunan yang akan mendirikan sebuah bangunan berlantai empat pada sebidang tanah maka langkah pertama dan sangat penting untuk dipikirkan adalah menciptakan landasan/pondasi bangunan yang kokoh dan dalam sehingga mampu menopang bangunan yang akan dibuat yang berlantai empat itu. Menurut Print landasan kurikulum (*curriculum foundation*) adalah “hal yang sangat mendasar dan berpengaruh pada bentuk dan pikiran pengembang kurikulum yang akan mempengaruhi penyusunan pada isi dan struktur kurikulum”.⁶ Senada dengan pendapat Print menurut Nasution, melakukan pengembangan kurikulum bukanlah sesuatu yang mudah dan banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan dengan cara menghadirkan pertanyaan pokok dan memunculkannya dalam benak pengembang dan perancang kurikulum untuk kemudian dipertimbangkan dan dipikirkan secara mendalam sehingga akan menghasilkan sebuah rancangan kurikulum yang memiliki kekuatan dan analisis pikiran yang tajam dan kuat.⁷

⁵ Hasan, 2002. *Kurikulum Berbasis Kompetensi Berdasarkan SK Mendiknas Nomor 232/U/2000 dan Alternatif Pemecahannya*. Bandung: UPI. h.23

⁶ Print, Murray. 1993. *Curriculum Development and Design*. Australia. Allen & Unwin.p.32

⁷ Nasution, R, 1993. *Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. h.27

Dalam pandangan Tyler, untuk menyusun tujuan pendidikan yang merupakan langkah pertama yang ditawarkannya dalam pengembangan kurikulum dengan memperhatikan dua unsur pokok dalam pemilihan dan menentukan tujuan pendidikan yaitu unsur filosofi dan psikologi.⁸ Penggunaan filosofi dalam pemilihan tujuan mampu mengaktualkan secara operasional tujuan pendidikan itu sehingga dapat memilih dan mengeliminasi tujuan pendidikan yang ada, penggunaan psikologi dalam pembelajaran dan pemilihan tujuan dimaksudkan untuk memenuhi karakteristik manusia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Taba menambahkan landasan-landasan yang ditolelir dan harus ada dalam melakukan pengembangan kurikulum adalah *pertama*, landasan sosial bahwa analisis sosial dilakukan sebagai sesuatu yang sangat penting karena adanya perubahan teknologi sosial dimana pendidikan memiliki aturan serta memiliki hubungan dengan aspek struktur sosial, demografi, ekonomi, politik dan sosial serta ideologi dan spritualnya. Kedua, landasan budaya dimana faktor budaya sudah sangat jelas membutuhkan pendekatan antara disiplin ilmu pendidikan dengan disiplin ilmu budaya itu sendiri dan akan membawa perubahan manusia dan lingkungan sosial. Ketiga, landasan mental dan intelektual dimana pengukuran kemampuan mental dan intelektual anak dalam sekolah akan digunakan untuk menentukan kelanjutan pendidikan itu serta menentukan juga tujuan sekolah. Keempat, landasan pengetahuan bahwa pengetahuan adalah hal yang sangat berharga sekali dalam pendidikan dan prosesnya, kurikulum seharusnya disusun dengan memperhatikan subyek, isi pelajaran dan disiplin dengan analisis dan digali dari disiplin ilmu yang ada.⁹ Pemahaman filosofis sebagai pengembang kurikulum dimulai dari pemahaman yang dalam dengan berbagai landasan-landasan dan pola pikir dalam pengembangan kurikulum itu secara komprehensif disamping kemampuan non teknis lainnya yang harus dikuasai. Kalau kita gabungkan pendapat dari ahli yang ada maka pengembangan kurikulum berada pada lima landasan utama yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan masyarakat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta landasan ideologi dan politik seperti dalam gambar 1 sebagai berikut :

⁸Tyler, R.W.(1949). *Basic Principles of Curriculum and Instructions*. Univ. of Chicago Press.

⁹Taba, Hilda.1962.*Curriculum Development,Theory and Practice*. New York. Harcourt, Brace & World . p.17

Gambar 1
Landasan Pengembangan Kurikulum



Sumber : Diperoleh dari gabungan beberapa sumber

1) Landasan Filosofis

Kajian-kajian filosofis kurikulum meliputi kajian substansi keilmuan dan batang tubuh keilmuan yang akan diturunkan menjadi isi pelajaran untuk disampaikan kepada mahasiswa.¹⁰ Keberadaan filsafat dalam kurikulum adalah sangat fundamental sekali karena yaitu pertama, filsafat dapat menentukan arah dan tujuan pendidikan. Kedua, filsafat dapat menentukan isi materi pelajaran yang harus diberikan kepada siswa. Ketiga, filsafat menentukan strategi atau cara pencapaian tujuan pelajaran. Keempat, filsafat menentukan tolok ukur keberhasilan pendidikan. Maka pemahaman yang komprehensif tentang filsafat adalah hal yang utama yang harus dimiliki seorang pengembang kurikulum dan tentunya harus dipadu dengan kajian yang lain untuk memperkaya pemikiran pengembang kurikulum. Pemahaman yang benar dan konsisten tentang filsafat ini adalah sebuah *strating point* positif dan sangat menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam proses pengembangan kurikulum itu.

2) Landasan Psikologis

Psikologis sering dipahami sebagai aspek kejiwaan seorang anak atau peserta didik. Kiranya pemahaman ini perlu diperkaya dengan konsep perilaku dan perkembangan intelektual, emosional dan spiritual anak sehingga sebagai pengembang kurikulum dapat menyusun dan mengembangkan metode dengan muatan bahan yang mengikuti perkembangan itu.¹¹ Tidak dapat dipungkiri bahwa mengajar tidak cukup dengan keahlian penguasaan materi yang dimiliki akan tetapi keahlian psikologis dalam bentuk kemampuan memahami setiap perilaku anak serta perkembangannya juga harus

¹⁰ E. Mulyasa.2003. *Kurikulum Berbasis Kompetensi. Konsep; Karakteristik dan Implementasi*. Bandung : P.T. Remaja Rosdakarya, h.19

¹¹ Hamalik, Oemar. 2008. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung : Remaja Rosdakarya, h.22

dipahami. Setiap fase perkembangan anak memperlihatkan keberagaman dalam perilakunya yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik keluarga, lingkungan, masyarakat sehingga berpengaruh dalam pembentukan watak dan perilaku anak. Kondisi ini menuntut guru untuk mampu membaca situasi dan memperlakukan anak didik sesuai dengan tahap perkembangannya.

3) Landasan Kemasyarakatan

Tidak ada yang tetap dalam hidup ini dan semuanya akan selalu berubah, begitu juga dengan kemasyarakatan yang termasuk didalamnya sosial, budaya. Semuanya akan selalu mengalami perubahan yang akan menimbulkan dua sisi yang berlawanan yaitu positif dan negatif. Perubahan aspek kemasyarakatan ini sangat nyata terlihat dalam struktur kemasyarakatan, kebiasaan, pola hidup, pekerjaan, pergaulan, tata perilaku, norma, keyakinan, dan lain sebagainya. Perubahan yang terjadi dalam aspek kemasyarakatan ini memperlihatkan arti dari hidup yang kita jalani. Perubahan yang terjadi setiap saat dan tidak terhitung jumlahnya, dalam kurikulum perubahan-perubahan dalam aspek ini hendaknya diperhatikan secara seksama sehingga apa yang seharusnya dan apa yang ada dapat berjalan bersama dan tercipta sinergis dalam konten yang diajarkan dalam lingkungan pendidikan. Dalam pada itu penciptaan perubahan tidak mesti ada di luar sekolah dalam arti sekolah pun berperan dalam menghadirkan perubahan itu yang akan diperkenalkan kepada masyarakat. Tidak semua yang ada dalam masyarakat menjadi keharusan sekolah untuk menyediakannya, maka proses seleksi dan penyaringan mutlak dilakukan.

4) Landasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan tidak dapat dicegah karena manusia dengan potensi akalnyanya terus berpikir dan menghasilkan temuan-temuan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi dan kebutuhan pada waktu itu. Pada satu sisi kita sangat bergembira dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang kajian ilmu sehingga akan semakin menambah arti hidup yang dijalani sementara disisi lain perkembangannya ilmu yang tidak dilandasi oleh nilai-nilai positif dan moral akan berakibat terjadinya penyalahgunaan sehingga akan merusak dan menghancurkan tatanan hidup yang telah ada. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan maka teknologi sebagai salah satu bentuk karya dari kemajuan manusia dalam berpikir. Teknologi sering diidentikkan dengan temuan-temuan manusia dalam bentuk alat, padahal teknologi lebih luas dari hanya sekedar temuan dalam bentuk alat akan tetapi meliputi segala sesuatu cara yang dilakukan dan diupayakan untuk memudahkan pekerjaan manusia.

5) Landasan Ideologi Politik

Ideologi sebuah negara sangat diilhami oleh kebijakan-kebijakan politik yang dilahirkan serta historis negara. Sehingga menjadi ciri khas yang harus dimiliki. Percaturan politik dunia hari ini ditenggarai dengan ideologi-ideologi yang dimiliki setiap negara di dunia dan terpolarisasi kepada ideologi barat dan timur. Secara historis ideologi barat sangat didominasi oleh paham kebebasan, individualistik yang dimotori oleh Amerika Serikat dan negara yang berada di kawasan Eropa khususnya Eropa Barat. Sementara ideologi timur memiliki kecenderungan pada sosialis komunis yang dimotori oleh Rusia dan Cina. Namun di samping dua ideologi besar ini pada kawasan negara-negara di timur tengah mengusung nilai-nilai Islam sebagai ideologi negaranya, dan beberapa negara di kawasan Asia mengusung ideologi agama dan budaya sebagai karakteristiknya. Perbedaan ideologi negara di dunia hari ini sangat kental terjadinya diseminasi dan perebutan pengaruh untuk kepentingan negara yang bersangkutan. Banyak kurikulum yang disusun oleh negara dipengaruhi oleh ideologi yang dimiliki untuk melanjutkan dan mewariskan kepada generasi penerus dinegaranya. Indonesia sebagai negara dengan ideologi Pancasila sudah sewajarnya melakukan proses internalisasi dan membumikan nilai pancasila dalam jiwa setiap manusia Indonesia sehingga dapat diteruskan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Proses internalisasi ini akan terlihat dalam penyusunan konten dalam pelajaran dan dikemas dalam pembelajaran yang profesional. Kepentingan negara dengan pendidikan dan generasi penerus sangat besar karena keberlanjutan negara ada ditangan mereka maka kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam pendidikan adalah representasi kepentingan negara dalam sektor pendidikan.

Penting kiranya Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Samarinda mempertimbangkan landasan kemasyarakatan, psikologis dan IPTEK dalam pengembangan kurikulumnya sehingga mampu memenuhi aspek dan kajian kurikulum secara teoritis khususnya pada landasan pengembangan kurikulum, karena dasar hukum yang hanya dijadikan sebagai dasar pengembangan akan menyebabkan kepincangan dan ketidakmampuan kurikulum itu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat penggunanya.

b. Dasar Filosofis dan Profil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

Dasar filosofis Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam dinilai cukup baik dalam memberikan warna dan karakteristik pada kurikulumnya, hal ini terlihat dari visi dan misi yang diusung oleh Jurusan Syariah dan

Ekonomi Islam STAIN Samarinda ini sangatlah berfilosofiskan hukum bisnis syariah yang sangat cocok dengan karakteristik Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam sebagai institusi yang akan menghasilkan calon sarjana yang memiliki naluri bisnis yang berlandaskan pada hukum syariah sehingga komitmen menjadi sangat penting artinya dalam melihat berbagai persoalan dan peluang bisnis. Visi dan misi ini setidaknya dapat dilihat sebagai *pertama* penentu arah dan tujuan pendidikan di Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. Kedua, menentukan isi materi pelajaran yang harus diberikan kepada mahasiswa. Ketiga, menentukan strategi atau cara pencapaian tujuan pelajaran. Keempat, menentukan tolok ukur keberhasilan pendidikan, oleh karena itu tujuan, isi materi kuliah, strategi pembelajaran dan tolok ukur keberhasilan sangat dipengaruhi dan harus memperlihatkan visi dan misi itu terimplementasikan dalam empat aspek ini.

2. Desain Kurikulum

Desain kurikulum Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam memuat karakteristik kurikulum, struktur kurikulum, kualifikasi dosen, bebas SKS, presentasi SKS kompetensi, beban studi, pelaksanaan perkuliahan dan pengambilan mata kuliah.

a. Karakteristik Kurikulum

Secara jelas dinyatakan bahwa kurikulum di Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berbasis kompetensi, artinya kurikulum yang disusun sarat akan muatan-muatan kompetensi yang tercermin dari dasar filosofis, visi, misi, dan tujuan. Akan tetapi penamaan kurikulum berbasis kompetensi tidaklah terlihat dengan jelas mulai dari visi, misi, tujuan sebagaimana yang dinyatakan dalam dokumen kurikulum Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam sendiri bahkan standar kompetensi lulusan pun tidak dinyatakan dan tidak dicantumkan dalam desain kurikulum.

Kompetensi yang merupakan rohnya PBK dapat dimaknai sebagai kemampuan atau kualifikasi yang disyaratkan untuk dipenuhi oleh seseorang dalam setiap jenjang pendidikan yang dilaluinya. Dalam bahasa Inggris istilah kompetensi (*competency*) dibedakan dengan istilah kompeten, kompetensi (*competence*) meskipun demikian dalam *Webster's New Dictionary and Theasaurus on-line* ternyata hanya dijumpai istilah kompeten saja dan istilah kompetensi lebih diarahkan pada istilah *responsibility*. Wuryadi dalam Sidharta menekankan bahwa kompetensi secara *defense* istilahnya lebih memiliki keterkaitan makna dengan kemampuan (*capability, ability*), kecakapan (*skill*), cerdas (*smart*),

kewenangan (*authority*), kinerja (*performance*), perilaku (*attitude*), dan kesadaran (*awereness*), berikut beberapa definisi kompetensi :¹²

- 1) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu.¹³
- 2) Gonczi dan Hager mengatakan kompetensi adalah *a complex combination of knowlodge, attitudes, skills, and values diplayed in the contex of task performances*.¹⁴
- 3) Menurut Jones kompetensi adalah suatu pengetahuan dan keterampilan khusus dan cara penerapan pengetahuan serta keterampilan tersebut mengikuti sebuah baku kinerja (*standard performance*) yang telah ditetapkan.¹⁵
- 4) Taylor-Powell kompetensi diartikan sebagai sejumlah pengetahuan, keterampilan dan kemampuan untuk melakukan tugas atau rencana tertentu.
- 5) Risher kompetensi adalah kemampuan yang menyumbangkan tercapainya keberhasilan kinerja.¹⁶
- 6) Suparno mengartikan kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang telah menjadi cara bertindak dan berpikir seseorang dengan kata lain suatu kemampuan yang sungguh telah menjadi bagian hidup seseorang sehingga langsung dapat digunakan dalam menghadapi permasalahan maupun dalam bertindak.¹⁷
- 7) Kepmendiknas RI No 045/U/2002 menyatakan bahwa kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu.
- 8) Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.¹⁸

Sementara itu kompetensi sebagai terjemahan dari *competence* sebagaimana yang dikutip oleh adalah :¹⁹

¹² Sidharta, Raharjo B, 2002. "Pendidikan Berbasis Kompetensi sebuah Kajian Kritis". Yogtakarta.Universitas Atmajaya, h.181-182

¹³ SK Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002

¹⁴ Soewono, Johanna, 2002." *Pendidikan Berbasis Kompetensi*". Yogtakarta.Universitas Atmajaya, h.54

¹⁵ Sidharta, Raharjo B, 2002. "Pendidikan Berbasis Kompetensi sebuah Kajian Kritis". Yogtakarta.Universitas Atmajaya, h.181

¹⁶ Sidharta, Raharjo B, 2002. "Pendidikan Berbasis Kompetensi sebuah Kajian Kritis". Yogtakarta.Universitas Atmajaya, h.182

¹⁷ Suparno, Erman. 2009. *Peran Universitas sebagai Institusi Intelektual Kapital dalam Penanggulangan Pengangguran dan Kemiskinan*. Kuliah Umum di Universitas Jenderal Soedirman 27 Maret 2009. Purwokerto. h.68

¹⁸ Direktorat Pengembangan Akademis dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Diknas .(2002). *Panduan Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Pendidikan Tinggi Berbasis Kompetensi*. Jakarta. Ditjen Dikti Depdiknas

- 1) *Working Group in Vocational Qualification* tahun 1986 menyatakan kompetensi adalah kemampuan untuk melakukan sebuah kegiatan tertentu dengan patokan (standar) tertentu pula.
- 2) UDACE tahun 1989 kompetensi adalah sesuatu yang dapat dilakukan seseorang ketimbang apa yang dia ketahui.
- 3) Brezinka menyatakan bahwa kompetensi adalah sebuah kualitas kepribadian yang relatif permanen yang memperoleh pengakuan oleh masyarakat.

b. Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Samarinda seharusnya mencerminkan struktur kurikulum berbasis kompetensi, artinya penamaan mata kuliah dan substansi kajian juga harus mencerminkan kurikulum berbasis kompetensi sehingga pada penamaan mata kuliah tidak lagi dengan pendekatan kajian ilmu namun lebih pada pendekatan praktik atau kerja. Namun mata kuliah di Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Samarinda pada penamaanya masih memakai pendekatan dengan kajian ilmu (subjek akademik) yang terlihat pada penamaan mata kuliah, namun tidak berarti dengan penamaan mata kuliah yang tidak mencerminkan KBK maka kurikulum Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Samarinda tidak berdasarkan KBK, maka dalam deskripsi mata kuliah atau sinopsis serta dalam silabus dan SAP hendaknya mencerminkan kompetensi dengan menguraikan pada indikator-indikator perilaku yang terukur dan jelas.

Hal yang keliru dalam struktur kurikulum Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Samarinda adalah dengan mengelompokkan mata kuliah kepada lima komponen yaitu: mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK), mata kuliah keilmuan dan keterampilan (MKK), mata kuliah keahlian berkarya (MKB), mata kuliah perilaku berkarya (MPB), mata kuliah berkehidupan bersama (MBB), kekeliruan ini sebenarnya merupakan bentuk kesalahan dalam penafsiran SK Mendiknas No 234/U/2000 dimana beberapa perguruan tinggi di daerah menindaklanjuti dengan melakukan pengelompokan mata kuliah kepada lima pengelompokan ini. Dasar pengelompokan mata kuliah ini sebagaimana yang tertera dalam SK Mendiknas No 234/U/2000 ini sebenarnya memiliki tiga dasar pemikiran yaitu *pertama*, konsep empat pilar pendidikan UNESCO. Kedua, persyaratan kerja yang dituntut oleh dunia global. Ketiga, usaha penyepadanan dalam konteks nasional (Samul Rizal).

¹⁹ Sidharta, Raharjo B, 2002. "*Pendidikan Berbasis Kompetensi sebuah Kajian Kritis*". Yogyakarta. Universitas Atmajaya, h.181

Tabel 4.5
 Dasar Pemikiran Pengelompokan Mata Kuliah
 Berdasarkan SK Mendiknas No 234/U/2000

| PERSYARATAN | KERJA | IBE UNESCO | KURIKULUM INTI & INSTITUSIONAL |
|--|-------|---------------------------|---|
| Penguasaan pengetahuan dan ketrampilan : <ul style="list-style-type: none"> • analisis dan sintesis • menguasai IT/computing • managed ambiguity • communication • 2nd language | | learning to know | Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKKK) |
| | | learning to do | Matakuliah Keahlian Berkarya (MKKB) |
| Attitude : <ul style="list-style-type: none"> • kepemimpinan • teamworking • can work crossculturally | | learning to be | Mata kuliah Perilaku Berkarya (MKPB) |
| | | learning to live together | Mata kuliah berkehidupan bersama (MKBB) |
| Pengenalan sifat pekerjaan terkait : <ul style="list-style-type: none"> • Terlatih dalam etika kerja • Memahami makna globalisasi • Fleksibel thd pilihan pekerjaan | | | MK Pengemb. Kepribadian (MKPK) |

Sumber : Samsul Rizal

Dari tabel 4.5 di atas menjelaskan bahwa usaha penyepadanan yang dilakukan dengan mengelompokkan mata kuliah kepada lima kelompok mata kuliah untuk memenuhi konsep UNESCO dan untuk persyaratan dunia kerja, kekeliruan dalam penafsiran ini berawal dari kesalahan dalam mengelompokkan dan penamaan kelompok mata kuliah dan dipaksakan untuk disesuaikan dengan konsep pilar pendidikan UNESCO seperti konsep *learning to know*, disepadankan dengan kelompok mata kuliah keilmuan dan keterampilan (MKK), konsep *learning to do* disepadankan dengan kelompok mata kuliah keahlian berkarya (MKKB), konsep *learning to be* disepadankan dengan mata kuliah perilaku berkarya (MKPB), konsep *learning to live together* disepadankan dengan mata kuliah berkehidupan bersama, dan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian.

Lima pilar pendidikan yang dihasilkan UNESCO ini tidaklah diartikan sebagai pengelompokan mata kuliah akan tetapi dijadikan sebagai muatan-muatan yang seharusnya ada dan terdapat dalam setiap mata kuliah. Kesalahan dalam penafsiran ini akhirnya terjadi pada hampir seluruh kampus karena SK Mendiknas sifatnya mengikat, kesalahan ini diperbaiki dengan dikeluarkannya SK Mendiknas No 045/U/2002 dengan lahirnya konsep elemen kompetensi dimana terdapat lima elemen kompetensi yang harus ada dalam setiap mata kuliah yaitu:

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

Pasal 2

1) Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas:

- a. kompetensi utama;
- b. kompetensi pendukung;
- c. kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.

- 2) Elemen-elemen kompetensi terdiri atas:
 - a. landasan kepribadian;
 - b. penguasaan ilmu dan keterampilan;
 - c. kemampuan berkarya;
 - d. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
 - e. pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Seharusnya dengan SK Mendiknas No 045/U/2002 kekeliruan penafsiran tidak terjadi lagi dan pengelompokan mata kuliah dengan lima kelompok yang sudah terjadi tentunya harus direvisi, akan tetapi sampai saat ini Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Samarinda masih memakai pengelompokan mata kuliah dengan lima kelompok tadi, akibatnya setiap mata kuliah kehilangan ruh dan komponen yang dikandungnya seakan menguap dan dilebur menjadi satu kemampuan sesuai dengan nama kelompok mata kuliahnya, padahal setiap mata kuliah seharusnya memiliki minimal lima elemen kompetensi atau empat muatan sebagaimana dalam usulan UNESCO. Akhirnya struktur kurikulum di Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Samarinda tidak memiliki kejelasan akan masing-masing kompetensi sebagaimana yang diatur dalam SK Mendiknas No 045/U/2002 dimana kompetensi yang harus ada adalah kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya.

Terlepas dari kelemahan struktur kurikulum yang telah dianalisis di atas, pada sisi lain terutama dalam pilihan mata kuliah yang menyediakan mata kuliah pilihan dengan jumlah lebih dari satu mengindikasikan kurikulum di Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Samarinda memenuhi prinsip pokok dalam pengembangan kurikulum yaitu prinsip fleksibilitas, disamping prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas juga dapat terlihat pada kurikulum Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Samarinda karena adanya beberapa mata kuliah yang membutuhkan persyaratan khusus sebagai mata kuliah prasyarat sebelum mengontrak mata kuliah yang ditentukan, hal ini untuk menjaga kontinuitas ilmu dan penguasaan konsep yang jelas bagi mahasiswa.

2. Pengembangan Kurikulum Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Samarinda

Konsep *triple helix of knowledge-industry-university* dalam pandangan Alhumami adalah sebuah keniscayaan bahwa antara industri dan pengetahuan membentuk sebuah hubungan segitiga yang saling terkait

satu dengan yang lainnya.²⁰ Leydesdorff dan Meyer (2003) juga memperkenalkan istilah yang hampir mirip yaitu *the triple helix of university industry and government relation* dimana dalam konsep ini hubungan segitiga yang terbentuk antara pemerintah, industri dan universitas.²¹ Konsep ini menekankan peranan perguruan tinggi sangatlah vital dan secara langsung berhubungan dengan dua sisi yang lain baik pemerintah maupun pengetahuan. Agaknya konsep ini tidak berbeda dari prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang telah diuraikan di atas, namun secara khusus dua konsep ini lebih menekankan pada peran perguruan tinggi sebagai institusi.

Tantangan globalisasi yang ditandai dengan berbagai situasi ketidakpastian yang tinggi dan paradoksial merupakan situasi nyata yang dihadapi sehingga perguruan tinggi berada dalam posisi yang dilematis antara tuntutan yang ada dengan kemampuan yang dimiliki. Pada satu sisi tuntutan terhadap perguruan tinggi agar menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dengan lulusan yang berkompeten dan sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan terutama oleh dunia kerja semakin kuat didengungkan sementara pada sisi lain keterbatasan sumberdaya manusia dan sumberdana menjadi kendala tersendiri yang dihadapi oleh perguruan tinggi di negari ini. Fenomena ini agaknya menjadi persoalan serius yang dihadapi oleh perguruan tinggi yang berada di negara-negara berkembang, akan tetapi situasi yang berbeda tidak akan ditemui pada perguruan tinggi di negara-negara maju dimana persoalan yang mereka hadapi tidak lagi berada pada tataran kekurangan sumberdaya dan sumberdana namun persaingan yang semakin ketat dan upaya untuk memenangkan persaingan menjadi bagian dinamika kompetisi yang terus melecit semangat mereka untuk melakukan berbagai inovasi dan pembaharuan dalam segala sisi. Sebuah terobosan besar dalam bentuk produk hukum yang dikeluarkan pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 32 tahun 2009 tentang “mekanisme pendirian badan hukum pendidikan, perubahan badan hukum milik negara atau perguruan tinggi, dan pengakuan penyelenggara pendidikan tinggi sebagai badan hukum pendidikan” kiranya patut dicermati secara seksama dan hati-hati. Logikanya perguruan tinggi yang dijadikan sebagai BHPP atau BHPM adalah terbukanya akses perguruan tinggi untuk melebarkan sayapnya yang tidak hanya memikirkan keilmuan saja akan tetapi juga berpikir untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan menjadikan perguruan untuk mandiri di samping tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran dari pusat.

²⁰ Alhumami, Amich. (2008). *Pendidikan Tinggi dan Globalisasi*. [Offline] Tersedia: els.bappenas.go.id/upload/kliping/Pendidikan%20tinggi.pdf. Diakses tanggal 30 Oktober 2013 Pukul 22.49 WITA

²¹ http://repository.library.uksw.edu/bitstream/handle/123456789/1289/PROS_Eddi%20Indro%20A_Perancangan%20Incubator%20Model_Full%20text.pdf?sequence=5. Diakses tanggal 30 Oktober 2013 Pukul 22.49 WITA

1. **Kebutuhan *Stakeholders* sebagai Dasar Pengembangan Kurikulum Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Samarinda**

Ungkapan ini mungkin telah sering kita dengar, bahkan barangkali telah menjadi hal yang biasa dan ada dalam tema-tema diskusi yang memperdebatkan tentang kurikulum. Secara teoritis atau konsep keilmuan memperhatikan kebutuhan *stakeholder* adalah sebuah keharusan yang dilakukan oleh pengembang kurikulum, terutama sangat ditekankan oleh Oliva, Skillback. apabila kebutuhan *stakeholders* telah teridentifikasi dengan jelas maka disilah langkah awal pekerjaan pengembang kurikulum untuk menyusun struktur kurikulumnya. Dalam konteks globalisasi saat ini kebutuhan *stakeholder* (masyarakat pengguna) tentunya sangat beragam tergantung pada bidang masing-masing. Seiring dengan semakin meluasnya pembicaraan tentang kompetensi dalam konteks kurikulum berbasis kompetensi terjadi sebuah pergeseran penilaian seorang lulusan perguruan tinggi yang sebelumnya berorientasi pada *hardskill* bergeser kepada *softskill*. Walaupun keduanya adalah konsep kompetensi namun terdapat perbedaan dimana *hardskill* lebih terarah pada kemampuan-kemampuan yang terlihat secara nyata dan mudah dibuktikan sedangkan *softskill* adalah kemampuan interaksi sosial yang dimiliki seseorang sebagai sikap, pandangan hidup, tata nilai yang dijalani. Orang yang memiliki *hardskill* yang bagus belum tentunya memiliki *softskill* yang baik dan sebaliknya *softskill* yang baik dapat didorong sedemikian rupa untuk memiliki *hardskill* yang diinginkan.

2. **Siklus Pengembangan Kurikulum**

Pengembangan kurikulum merupakan sebuah proses yang berlangsung secara terus menerus dan membentuk sebuah siklus. Seperti siklus kehidupan manusia yang bermula dari kelahiran, kemudian menjalani kehidupan dari kecil, remaja, dewasa, tua hingga akhirnya meninggal dunia, perjalanan hidup kita dalam fase atau siklus di dunia tentunya telah berakhir dan akan dilanjutkan pada fase kedua yang tidak pernah diketahui bagaimana siklusnya. Begitu juga dengan pengembangan kurikulum bermula dari kurikulum itu direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi. Kurikulum Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Samarinda sangat penting kiranya dikembangkan dengan inovasi dan terobosan baru yang lebih kompetitif yang mampu menjawab setiap persoalan ekonomi yang ada disertai dengan kemampuan lulusan untuk bersaing dengan dunia kerja, sehingga dengan demikian kebutuhan masyarakat pengguna (*stakeholders*) dapat dipenuhi secara optimal melalui upaya pengembangan kurikulum secara berkelanjutan.

Terkait dengan langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam mengembangkan kurikulum Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Samarinda kedepan hendaknya dilakukan secara simultan yang dimulai dengan pengembangan kurikulum pada wilayah

desain, implementasi sekaligus evaluasi. Ornstein dan Hunkins²² menyatakan pengembangan kurikulum terdiri atas tiga yaitu (a) mendesain kurikulum, (b) mengimplementasikan kurikulum dan, (c) mengevaluasi kurikulum. Brady (1992) menyebutkan bahwa pengembangan kurikulum terdiri atas : (a) penyusunan konteks kurikulum (*curriculum contex*), (b) proses kurikulum (*curriculum process*), (c) manajemen kurikulum (*curriculum management*), (d) *curriculum translation*, (e) melakukan evaluasi (*curriculum evaluation*). Print (1989) mengidentifikasi pengembangan kurikulum terdiri atas: (a) tahap pengorganisasian, (b) tahap pengembangan terdiri atas analisis situasi, penetapan tujuan, penetapan isi pelajaran, penetapan aktivitas belajar, evaluasi instruksional, dan (c) tahap aplikasi terdiri atas monitoring, *feedback* dan implementasi serta modifikasi. Dari siklus pengembangan kurikulum yang ditawarkan oleh beberapa ahli pada hakikatnya tidaklah berbeda, walaupun jumlah siklus dan tata urutannya berbeda namun pengembangan kurikulum akan selalu berangkat dari siklus perencanaan (desain), pelaksanaan (implementasi) dan evaluasi.

3. Model Pengembangan Kurikulum

Untuk mengembangkan kurikulum di Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Samarinda kiranya para pengembang kurikulum Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Samarinda perlu mempertimbangkan beberapa model pengembangan kurikulum yang lazim dipakai sebagai pedoman dan arahan dalam upaya melakukan pengembangan kurikulum secara sistematis, karena kegiatan pengembangan kurikulum bukanlah proses yang sederhana karena melalui beberapa tahap dan memperhatikan banyak faktor. Untuk lebih memahami proses pengembangan kurikulum, banyak ahli memberikan kontribusi pemikiran dalam berbagai sudut pandangnya, secara garis besar Print (1989:60) membaginya dalam tiga pembagian model yaitu model objektif/rasional dicetuskan oleh Tyler dan Taba, model siklikal oleh Wheeler dan Nicholls, model interaksi/dinamik oleh Walker dan Skilbeck. Tiga Model ini adalah hasil pengembangan satu dan yang lainnya, model siklikal adalah hasil pengembangan dari model rasional, model dinamik adalah kelanjutan pengembangan dari model siklikal.

a) Model Rational

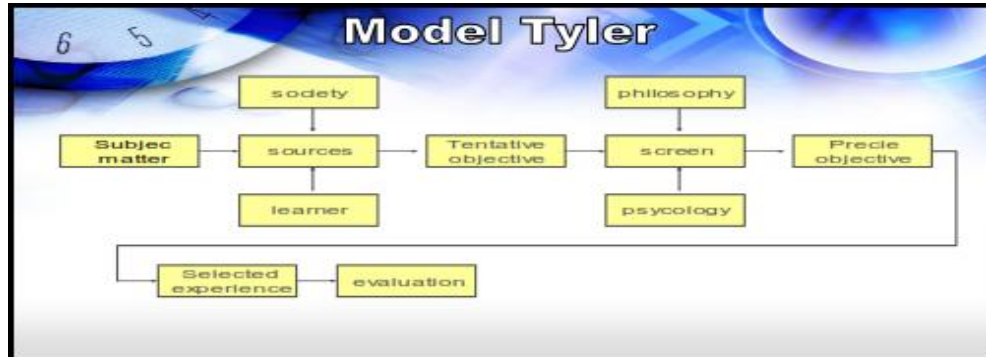
Model rasional dalam pengembangan kurikulum menegaskan bahwa tujuan pengajaran (*statement of objectives*) sangatlah penting dan komponen kurikulum bersifat tetap dan mendukung tujuan pengajaran itu. Pelopor model ini adalah Ralph Tyler (1949) dan Hilda Taba (1962).

²² Ornstein, Hunkins. 200). *Curriculum Foundation, Principles, and Issues*. Fifth Edition. United States of America. Pearson. p.211

1) Model Tyler

Gambar 3

Model Pengembangan Kurikulum Tyler (Orenstein dan Hunkins, 2009)



Menurut Tyler dalam bukunya yang berjudul *Basic Principles of Curriculum and Introduction*, merumuskan empat pertanyaan sentral yang meminta jawaban secara rasional bagi perencanaan kurikulum ialah (a) apa tujuan yang harus dicapai oleh sekolah? (b) apa pengalaman-pengalaman belajar yang dapat disediakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut? (c) bagaimana mengorganisasikan pengalaman-pengalaman tersebut? (d) bagaimana kita dapat memutuskan apakah tujuan-tujuan tersebut tercapai?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan kurikulum dapat menjadi suatu proses yang dikontrol dan logis, dimana langkah pertama adalah yang paling penting. Maka Tyler merumuskan model pengembangan kurikulum dalam empat tahap yaitu (a) menetapkan tujuan (b) memilih sejumlah pengalaman belajar (c) mengorganisasikan pengalaman belajar (d) melakukan evaluasi.

4. Pendekatan Dalam Pengembangan Kurikulum

Terdapat banyak metode yang bisa dioperasionalkan dalam pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan, dari sejumlah pendekatan yang ada penulis mengemukakan dua pendekatan yang dapat dipakai dalam pengembangan kurikulum yaitu CHBRM dan DACUM.

a) Pendekatan CBHRM (*Curriculum Based Human Resources Management*).

Terkait dengan pendekatan yang dipakai dalam penyusunan kurikulum di perguruan tinggi yang berbasis kompetensi, AB Susanto²³

²³ Susanto, A.B. 2002. "Pendidikan Berbasis Kompetensi Belajar dari Dunia Kerja". Yogyakarta. Universitas Atmajaya. h.102

menawarkan CBHRM (*Curriculum Based Human Resources Management*) yaitu pendekatan pengelolaan sumber daya manusia berlandaskan kinerja sebagai wujud aplikasi karyawan, artinya pendekatan ini adalah penyusunan dan penjabaran sasaran dan strategi korporat sehingga menjadi jembatan pencapaian sasaran dan strategi perusahaan serta pengembangan dan pemeliharaan kompetensi yang harus dikontribusikan dari sisi sumber daya manusia. Pendekatan CHBRM adalah pemeliharaan dan pengembangan *corecompetenscies* perusahaan, lebih lanjut dikatakan dengan CHBRM kompetensi SDM akan terdokumentasi dengan baik dan dapat dikembangkan searah dengan pemupukan *core competencies* perusahaan. Menggunakan pendekatan CHBRM dalam penyusunan kurikulum di perguruan tinggi berarti muatan kurikulum dalam insitusi pendidikan tinggi haruslah memberi perhatian terhadap kompetensi yang bukan hanya pada wilayah *skill* dan *knowledge* saja, dengan begitu kompetensi dalam bentuk perilaku yang terukur dan jelas akan sangat jelas terlihat pada setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata kuliah baik dalam tataran ide, dokumen dan implemmentasi.

Penyusunan kurikulum perguruan tinggi dengan menggunakan pendekatan CHBRM ini pada hakikatnya bertujuan untuk menemukan dan menyelaraskan antara kompetensi individu dengan kompetensi organisasi dalam hal ini insitusi pendidikan, Penentuan kompetensi dapat dilakukan dengan melakukan analisis kompetensi yang merupakan langkah awal dalam pengembangan atau penyusunan kurikulum dengan pendekatan CHBRM ini, analisis kompetensi yang dilakukan akan menjawab beberapa pertanyaan pokok yaitu (a) apa yang harus diketahui dan dipahami (pengetahuan), (b) apa yang harus mampu dikerjakan (*skill*), (c) perilaku apa yang diperlukan agar mampu mengubah masukan (pengetahuan dan *skill*) menjadi keluaran (hasil) yang sesuai dengan norma dan nilai organisasi. Terkait dengan analisis kompetensi pada pendekatan CHBRM dikenal dua jenis analisis kompetensi yaitu analisis fungsional yaitu analisis terhadap tugas (kegiatan pekerjaan) dan fungsi (tujuan pekerjaan) untuk menetapkan kemampuan yang diperlukan serta analisis perilaku yaitu analisis terhadap kapabilitas individu.

b) Pendekatan *Dacum* (*Dacum Approach*)

Blank (1982:18) dalam Hilman²⁴ mengidentifikasi ada tiga strategi pendekatan yang dipakai dalam mengidentifikasi dan memverivikasi kompetensi yaitu: (a) mengobservasi secara nyata apa yang dilakukan oleh seorang pekerja pada jabatan tertentu, (b) melakukan pertemuan dengan para pekerja pada jabatan tertentu, (c) mengajukan daftar tugas tentatif kepada pekerja pada jabatan tertentu. *Dacum* sebagai pendekatan yang dipakai dalam melakukan pengembangan kurikulum adalah contoh ke 2 dari

²⁴Hilman, Asep Fitri (2008). *Pengembangan Kurikulum Program Studi Diploma III Analisis Kesehatan Berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Penelitian tentang cara Menurunkan Standar Kompetensi menjadi mata Kuliah pada Program Studi Analisis Kesehatan Poltekes Bandung*. Tesis Pada SPS UPI Bandung. Tidak dipublikasikan. h.34

tiga strategi diatas yaitu melakukan pertemuan dengan para pekerja pada jabatan tertentu dengan cara melakukan pertemuan dalam bentuk workshop yang dihadiri oleh para *expert* pada jabatan pekerjaan dalam waktu beberapa hari, sedangkan peran dosen atau instruktur adalah mengarahkan jalannya *workshop*, para *ekspert* pada jabatan tertentu akan mengidentifikasi tugas-tugas utama pekerjaan (*dutys*) dan tugas-tugas spesifik (*task*) yang dilakukan dalam bekerja. Dengan menggunakan daftar semua *ekspert* akan mengidentifikasikan *dutys* dan *task* dengan *brainstorming* yang selanjutnya dilakukan pengurutan berdasarkan tingkat kepentingan dari yang sangat penting hingga kurang penting sehingga dihasilkan *duty* dan *task* yang betul-betul diperlukan.

C. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara obyektif kondisi kurikulum Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Samarinda cukup baik, baik dari sisi desain, implementasi dan evaluasi. Akan tetapi pada tiga aspek penting ini masih terdapat kekurangan sehingga masih perlu ditinjau dan dikaji secara utuh dan menyeluruh.
2. Pengembangan kurikulum Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Samarinda yang sudah dilakukan masih memperlihatkan ketidaksempurnaan dengan kajian kurikulum secara teoritis terutama pada tiga wilayah pokok pengembangan kurikulum yaitu desain, implementasi dan evaluasi.
3. Pengembangan kurikulum Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Samarinda berdasarkan kebutuhan masyarakat pengguna (*stakeholders*) adalah langkah penting sekaligus sebagai terobosan yang inovatif untuk dilakukan sehingga kebutuhan masyarakat dapat dibaca secara lebih komprehensif sekaligus mampu menjawab persoalan dan memberikan alternatif solusi terutama dengan krisis yang terjadi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhumami, Amich. *Pendidikan Tinggi dan Globalisasi*. Tersedia: [els.bappenas.go.id/upload/kliping/Pendidikan%20tinggi .pdf](http://els.bappenas.go.id/upload/kliping/Pendidikan%20tinggi.pdf). Diakses tanggal 30 Oktober 2013 Pukul 13.24 WITA
- Arends, Richard. 2008. *“Learning to Teach”, Avenue of the Americas New York, NY 10020*: McGraw-Hill Companies, Inc 1221.
- Brown, Bernice B., 1968. *Delphi Process a Methodology Used for the Alicitation of Opinion Expert*
- Brady, Laurie. 1992. *Curriculum Development*. Prentice Hall. Australia
- Dakir, 2004. *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta. PT.Asdi Mahastya
- Depdiknas. 2002. *Kegiatan Belajar Mengajar Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Puskur Balitbang.
- Dewan Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti. *Strategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi 2003-2010 (hinger Education Long Strategy HELTS 2003-2010)*. Jakarta. Dikti
- Diens, Admin. 2008. *Analisis Relevansi Desain Kurikulum Pelatihan Guru PAI MTs dengan Kebutuhan Kompetensi Guru di Lapangan pada Balai Diklat Keagamaan Manado Sulawesi Utara*. Tesis Magister pada SPS UPI: Tidak dipublikasikan
- Dirjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2010. *Rencana Strategis 2010-2014*. Jakarta. Dikti-Kemdikbud
- Dirjen Dikti. 2010. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Jakarta, Dikti.
- Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. *Strategi Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 2003-2010 (Higher Education Long Term Strategy/HELTS 2003-2010)*. Mewujudkan Perguruan Tinggi Berkualitas. (Jakarta. Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2005)
- Direktorat 2002. *Pengembangan Akademis dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Diknas. Panduan Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Pendidikan Tinggi Berbasis Kompetensi*. Jakarta. Ditjen Dikti Depdiknas
- E. Mulyasa. 2003. *Kurikulum Berbasis Kompetensi. Konsep; Karakteristik dan Implementasi*. Bandung : P.T. Remaja Rosdakarya
- Endang Soemantri, 1993, *Pendidikan Moral* ; Diklat, FPIPS IKIP Bandung
- Graves, Kathleen. 2000. *Designing Language Cources a Guide for Teachers*. Canada. Newbury House Teacher Development
- Hasan, 2002. *Kurikulum Berbasis Kompetensi Berdasarkan SK Mendiknas 232/U/2000 dan Alternatif Pemecahannya*, Bandung: UPI
- Hamid Hasan. 2008. *Evaluasi Kurikulum*. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Hasan, S. Hamid. 1984. *An Evaluation of The General Senior Secondary Social Studies*
- Hamalik, Oemar. 2004. *Implementasi Kirikulum*. Handout PPS Universitas Pendidikan Indonesia

Hamalik, Oemar. 2008. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung : Remaja Rosdakarya.